

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Kabupaten Bogor merupakan bukan merupakan daerah yang masuk kedalam penghitungan IHK di Jawa Barat, namun terkait perkembangan harga kebutuhan pokok dan penting setiap minggu dapat dilihat melalui rilis yang dikeluarkan oleh BPS yaitu IPH series. (Indeks Perkembangan Harga).

Ø Nilai IPH April Tahun 2025 yaitu $M2 = -0,6$. Andil cabai rawit(-0.4356), telur ayam ras(-0.3324), daging sapi(-0.3254). $M3 = -0,9$. andil cabai rawit(-0.7157), daging sapi(-0.4039), telur ayam ras(-0.3166) $M4 = -1,59$ andil cabai rawit(-1.0957), daging sapi (-0.434), telur ayam ras(-0.3822). Tren IPH bulan April menunjukkan deflasi yang semakin dalam dari minggu ke minggu, mencerminkan penurunan harga barang kebutuhan pokok dan penting secara signifikan sepanjang bulan tersebut. Kondisi ini erat kaitannya dengan situasi pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri, di mana setelah terjadi lonjakan permintaan dan harga menjelang lebaran, konsumsi masyarakat kembali menurun secara drastis, sementara pasokan komoditas tetap tinggi.

Ketidakseimbangan ini mendorong terjadinya surplus pasokan yang berujung pada penurunan harga, sebagaimana tercermin dalam IPH yang turun dari -0,6% ($M2$) menjadi -1,59% ($M4$). Komoditas seperti cabai rawit, daging sapi, dan telur ayam ras yang sebelumnya menjadi pemicu inflasi saat HBKN, justru menjadi penyumbang utama deflasi karena berkurangnya permintaan dan meningkatnya pasokan, termasuk dari panen hortikultura pasca musim tanam awal tahun.

Ø Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat di Kabupaten Bogor pada bulan April 2025 dari 11 komoditas yang dipantau harganya setiap minggu di tingkat pedagang, hampir seluruh komoditas mengalami mengalami penurunan harga kecuali komoditas Beras Premium (Naik 0,41%), Gula Pasir (naik 0,02%), Cabai Merah Keriting (Naik 0,61%) dan Kedelai (Naik 0,12%).

Ø Nilai IPH pada bulan Mei Tahun 2025 yaitu $M1 = -1,62\%$, $M3 = -2,49\%$, $M4 = -2,77\%$, $M5 = -2,93\%$. Penurunan IPH ini mencerminkan kondisi harga kebutuhan pokok yang menurun secara konsisten sepanjang bulan, terutama disebabkan oleh komoditas hortikultura yang sangat sensitif terhadap fluktuasi pasokan dan permintaan. Cabai rawit menjadi kontributor utama deflasi, dengan andil negatif yang terus meningkat dari -1,3842 di awal bulan menjadi -1,7895 di akhir bulan. Disusul oleh bawang merah dan cabai merah, yang juga menunjukkan kontribusi signifikan terhadap penurunan indeks, mencerminkan melimpahnya pasokan atau turunnya permintaan di tingkat konsumen.

Ø Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat di Kabupaten Bogor pada bulan Mei 2025 dari 11 komoditas yang dipantau harganya setiap minggu di tingkat pedagang, rata-rata seluruh komoditas mengalami seluruh komoditas di tingkat konsumen dengan harga di atas HAP/HET/ mengalami penurunan harga harga kecuali komoditas Beras Premium (Naik 0,19%), Beras Medium (Naik 0,36%), Gula Pasir (Naik 0,43%), Minyak Kita (Naik 0,23%), Cabai Rawit Hijau (Naik 0,46%) dan Jagung Pipilan (Naik 2,88%)

Ø IPH pada bulan Juni Tahun 2025 yaitu $M1 = -0,50\%$, $M2 = -0,47\%$, $M3 = -0,45\%$ dan $M4 = -0,35\%$. Selama Juni 2025, IPH tetap berada di zona deflasi dengan tren yang melemah, dari -0,50% di minggu pertama menjadi -0,35% di minggu keempat. Deflasi ini didorong oleh penurunan harga jeruk sebagai kontributor utama, disusul daging ayam ras, bawang merah, dan bawang putih. Kondisi ini mencerminkan harga kebutuhan pokok yang relatif stabil dan pasokan yang melimpah, terutama pada komoditas musiman.

Meskipun memberikan keuntungan bagi konsumen, deflasi yang berkepanjangan tetap berisiko menekan pendapatan petani dan dapat mengganggu keberlanjutan produksi, sehingga perlu diantisipasi dengan kebijakan harga yang seimbang.

Ø Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat di Kabupaten Bogor pada bulan Juni 2025 dari 11 komoditas yang dipantau harganya setiap minggu di tingkat pedagang, mengalami kenaikan harga harga kecuali komoditas Gula Pasir (Turun 0,17%), Minyak Kita (Turun 0,19%), Bawang Merah (Turun 2,08%), Bawang Putih (Turun 4,77%), Jagung Pipilan (Turun 0,16%), Daging Ayam Ras (Turun 0,87%) dan Daging Sapi (Turun 0,40%)

Ø Berdasarkan data IPH selama triwulan II tahun 2025 (April-Juni), perkembangan inflasi di tingkat daerah menunjukkan tren deflasi yang cukup tajam dan berkepanjangan, terutama dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas hortikultura seperti cabai rawit, cabai merah, bawang merah, serta beberapa komoditas protein hewani dan buah-buahan seperti daging ayam ras dan jeruk. Pada bulan Mei, IPH mengalami deflasi yang signifikan dari -1,62% ($M1$) hingga -2,93% ($M5$), dengan andil terbesar berasal dari cabai rawit yang mencapai -1,7895 poin, mencerminkan kejatuhan harga yang tajam dan merata pada komoditas strategis rumah tangga.

Sementara itu, pada bulan Juni, meskipun IPH tetap berada di wilayah negatif, tren deflasi mulai melemah dari -0,50% ($M1$) menjadi -0,35% ($M4$), mengindikasikan mulai adanya penyesuaian pasar dan perlambatan penurunan harga. Secara keseluruhan, pola ini menunjukkan bahwa inflasi daerah pada triwulan II cenderung sangat rendah, bahkan berisiko jatuh di bawah kisaran target nasional $2,5 \pm 1\%$, terutama bila tren deflasi terus berlangsung tanpa intervensi yang tepat.

Ø Deflasi yang berlarut-larut seperti ini tidak selalu menguntungkan, karena meskipun baik bagi konsumen dalam jangka pendek, hal ini dapat memberikan tekanan besar pada produsen, khususnya petani hortikultura, akibat harga jual yang berada di bawah biaya produksi. Dampak jangka menengahnya bisa mengarah pada berkurangnya insentif tanam dan produksi, yang dapat menimbulkan gangguan pasokan di bulan-bulan berikutnya, berujung pada potensi inflasi tajam (rebound inflation) yang sulit dikendalikan. Dalam konteks pengendalian inflasi nasional, kondisi ini perlu mendapatkan perhatian serius, karena jika terjadi di berbagai wilayah secara bersamaan, rata-rata inflasi nasional bisa terdorong ke bawah kisaran target, memicu risiko disinflasi atau bahkan deflasi umum yang kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan stabilisasi harga yang adaptif, seperti optimalisasi cadangan pangan pemerintah, penguatan distribusi antarwilayah, perlindungan harga dasar bagi petani, serta pengawasan terhadap biaya produksi dan rantai pasok, guna menjaga keseimbangan antara kestabilan harga konsumen dan kelangsungan ekonomi produsen di tingkat daerah.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Tekanan deflasi yang berkepanjangan pasca-Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) menjadi permasalahan utama dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Bogor pada triwulan II 2025. Setelah lonjakan permintaan menjelang dan selama Idulfitri, konsumsi masyarakat menurun drastis, sementara pasokan komoditas utama seperti cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah melimpah. Hal ini menyebabkan penurunan harga yang signifikan, yang terus berlanjut hingga bulan Juni. Meskipun deflasi ini memberikan keuntungan bagi konsumen, dampaknya cukup merugikan produsen, terutama petani, yang mengalami kerugian karena harga jual yang lebih rendah dari biaya produksi. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara pasokan yang berlimpah dan daya beli yang melemah, yang jika dibiarkan dapat mengancam kestabilan ekonomi daerah dalam jangka panjang.
2. Kelebihan pasokan tanpa mekanisme serapan harga yang efektif menjadi salah satu permasalahan signifikan dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Bogor pada triwulan II 2025. Meskipun hasil panen komoditas seperti cabai dan bawang melimpah, harga jual di tingkat petani tetap rendah, bahkan di bawah biaya produksi. Hal ini terjadi karena kurangnya intervensi harga dari pemerintah, seperti penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) atau operasi pasar untuk menyerap surplus pasokan tersebut. Akibatnya, petani menghadapi kerugian, dan insentif untuk meningkatkan produksi di masa mendatang berkurang. Selain itu, kelangkaan pasar untuk menyerap komoditas ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam rantai pasokan, yang dapat berdampak pada kelangkaan dan kenaikan harga di periode berikutnya. Maka, sistem serapan harga yang lebih baik dan lebih terkoordinasi sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan harga di tingkat petani dan konsumen.
3. Minimnya diversifikasi komoditas pengendali inflasi di Kabupaten Bogor menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan stabilitas harga di triwulan II 2025. Ketergantungan yang tinggi pada beberapa komoditas utama, seperti cabai, bawang, dan daging ayam, membuat inflasi daerah sangat rentan terhadap fluktuasi musiman dan gangguan cuaca. Ketika harga komoditas-komoditas ini jatuh tajam akibat kelebihan pasokan, dampaknya langsung dirasakan oleh perekonomian lokal, terutama petani dan pedagang. Selain itu, kurangnya komoditas alternatif yang dapat mengisi peran pengendali inflasi membuat pasar lebih sensitif terhadap perubahan harga pada komoditas tertentu. Untuk itu, diversifikasi komoditas pengendali inflasi yang lebih luas dan berbasis pada kekuatan lokal sangat diperlukan agar ekonomi daerah lebih tahan terhadap fluktuasi pasar dan lebih seimbang dalam menghadapi tantangan harga pangan.
4. Distribusi dan akses pasar yang tidak merata menjadi masalah penting dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Bogor pada triwulan II 2025. Meskipun distribusi barang mulai normal setelah libur panjang, ketimpangan akses pasar antarwilayah tetap terjadi, terutama antara pasar tradisional dan pasar modern. Harga barang di tingkat petani sering kali jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga jual di pasar konsumen, yang menciptakan disparitas harga yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya infrastruktur distribusi yang efisien dan sistem pemasaran yang kurang terintegrasi, yang menyebabkan beberapa wilayah lebih sulit mendapatkan barang dengan harga wajar. Tanpa adanya mekanisme distribusi yang lebih merata dan terkoordinasi, harga barang pokok di beberapa wilayah bisa terdistorsi, memperburuk ketidakstabilan harga dan memperpanjang dampak inflasi atau deflasi. Oleh karena itu, perbaikan dalam sistem distribusi pangan dan akses pasar yang lebih adil menjadi kunci untuk mengurangi ketidakseimbangan harga antarwilayah.

Koordinasi lintas sektor yang belum maksimal menjadi salah satu permasalahan utama dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Bogor pada triwulan II 2025. Meskipun ada upaya dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), namun koordinasi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan sektor swasta masih kurang terintegrasi dengan baik. Hal ini menyebabkan respons terhadap fluktuasi harga dan pasokan tidak cepat dan terarah, sehingga kebijakan yang diambil terkadang kurang tepat sasaran. Untuk itu, peningkatan koordinasi antar sektor, penguatan data dan informasi pasar, serta pembentukan mekanisme pengambilan keputusan yang lebih responsif menjadi sangat penting untuk menjaga kestabilan harga di tingkat daerah.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

A. Keterjangkauan Harga

1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor secara berkala memantau harga barang kebutuhan pokok untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga. Pemantauan ini membantu mendeteksi fluktuasi harga sejak dini, sehingga langkah intervensi dapat dilakukan dengan cepat, seperti operasi pasar atau pembentukan cadangan pangan. Selain itu, informasi pasar yang akurat disampaikan kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk mencegah spekulasi. Dengan koordinasi yang lebih baik, pemantauan ini mendukung kebijakan yang efektif dan responsif dalam menjaga kestabilan harga di pasar. Pemantauan dan pasokan setiap hari melalui aplikasi SIDIRGA yang terintegrasi dengan SiLINDA Jawa Barat.
2. Melaksanakan Gelar Pangan Murah dengan komoditas beras SPHP, beras medium, beras premium, telur ayam, daging ayam ras, minyak goreng, gula pasir, cabe merah keriting, cabe rawit, tepung terigu, bawang merah, bawang putih, daging sapi, cabe merah besar dan sayuran. Sampai bulan Juni 2025, Dinas Ketahanan telah melaksanakan sebanyak 195 kali Gelar Pangan Murah, dimana 190 kali sumber dana APBD kab Bogor dan 2 kali berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat dan 3 kali Mandiri. Pelaksanaan GPM tersebar di 40 Kecamatan dengan total omzet sebesar Rp 11.238.427.150,-

B. Ketersediaan Pasokan:

1. Penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah berupa beras serta daging dan telur ayam.
2. Cadangan Pangan Pemerintah.
3. Pelaksanaan Gerakan Menanam Padi Serentak dilaksanakan pada tanggal 23 April 2025 di 14 Provinsi yang dilaksanakan secara nasional melalui daring bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Menteri Pertanian, dan perwakilan dari 14 provinsi lainnya. Untuk Kabupaten Bogor dilaksanakan di Kecamatan Tamansari dengan luas panen 7000 meter
4. Pelaksanaan panen dan tanam jagung hibrida tanggal 8 Mei 2025 di hamparan pangkalan TNI AU Atang Senjaja, kerjasama dengan kelompok tani Berkah Mandiri dan Sumber Rezeki Desa Babakan Kecamatan Tenjo, dengan luas 5 ha.
5. Penambahan Luas Tambah Tanam (LTT) padi berhubungan langsung dengan ketersediaan pasokan beras, yang merupakan komoditas pangan utama di Kabupaten Bogor. Peningkatan LTT padi akan menambah jumlah produksi beras, sehingga pasokan beras di pasar lebih stabil dan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada impor beras dan mencegah lonjakan harga
- 5.

beras yang dapat memicu inflasi pangan. Dengan pasokan beras yang lebih mencukupi, stabilitas harga pangan di Kabupaten Bogor dapat terjaga, mendukung pengendalian inflasi di daerah tersebut. Pada triwulan II, penambahan LTT Padi di Kabupaten adalah seluas 11,30 Ha yang terdiri dari Kecamatan Nanggung sebanyak 6,30 Ha dan Kecamatan Cileungsi 2,00 Ha (April). 2,00 Ha di Kecamatan Sukajaya (Mei) dan 1,00 Ha di Kecamatan Nanggung (Juni).

6. Pelaksanaan panen raya padi tanggal 8 mei 2025 di kelompok Tani Bunga Tanjung Desa Sibanteng Kecamatan Leuwisadeng, luas hamparan 70 ha, dalam rangka 100 hari kerja Bupati Bogor

C. Kelancaran Distribusi:

1. Distribusi minyak goreng, minyakita di kegiatan Gelar Pangan Murah.
2. Distribusi beras petani lokal oleh BUMD Perumda Pasar Tohaga kepada ASN dalam program beras Carita Makmur.
3. Pembangunan infrastruktur program Satu Milyar Satu Desa (Samisade) dan program lainnya.

D. Komunikasi Efektif:

1. Mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI pada tanggal 14,21,28 April 2025; 05,19,26 Mei 2025 dan; 4,10,16,23,30 Juni 2025
2. Mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 17 April 2025; 8, 22 Mei 2025 dan; 26 Juni 2025.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Pemantauan dan Pasokan Barang

Pada triwulan II tahun 2025, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor telah melakukan pemantauan harga secara berkala untuk mendeteksi fluktuasi harga barang kebutuhan pokok, terutama komoditas strategis seperti cabai, bawang, dan daging ayam. Pemantauan ini menunjukkan upaya yang baik dalam memonitor pasar secara real-time dan mengidentifikasi potensi lonjakan harga. Namun, meskipun pemantauan dilakukan secara rutin, kurangnya integrasi data antar-sektor mengurangi kemampuan untuk melakukan intervensi yang cepat dan tepat. Dalam beberapa kasus, meskipun ada pemantauan, penurunan harga pada beberapa komoditas seperti cabai rawit dan bawang merah tidak dapat segera diatasi dengan kebijakan yang efektif, yang menunjukkan adanya keterbatasan dalam responsibilitas dan koordinasi antarlembaga.

2. Pelaksanaan Operasi Pasar dan Gelar Pangan Murah

Pelaksanaan Operasi Pasar dan Gelar Pangan Murah di Kabupaten Bogor telah membantu menurunkan harga pangan sementara, namun dampaknya terbatas pada cakupan wilayah dan stok yang terbatas. Operasi Pasar hanya menjangkau beberapa area dan tidak mampu mengatasi masalah harga dalam jangka panjang, sementara Gelar Pangan Murah terkendala

pada frekuensi dan distribusi yang tidak merata. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, perluasan cakupan, koordinasi yang lebih baik, dan peningkatan stok cadangan pangan sangat diperlukan. Dengan penjadwalan yang lebih reguler dan distribusi yang lebih merata, kebijakan ini dapat lebih efektif dalam mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan harga pangan di Kabupaten Bogor.

3. Bantuan Sosial dan Bantuan Pangan Pemerintah

Penyaluran bantuan pangan dari pemerintah, baik berupa beras, telur, maupun daging ayam, turut mendukung masyarakat dalam mengatasi kesulitan akibat lonjakan harga pangan. Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Pangan Pemerintah di Kabupaten Bogor telah membantu meringankan dampak inflasi, namun masih menghadapi tantangan seperti distribusi yang tidak merata, ketidaksesuaian jumlah bantuan, dan proses administrasi yang rumit. Program Gelar Pangan Murah juga efektif tapi terbatas oleh stok yang tidak mencukupi dan hanya memberikan solusi sementara. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan distribusi bantuan yang lebih merata dan tepat waktu, penyempurnaan administrasi, dan peningkatan kapasitas stok pangan agar ketahanan pangan jangka panjang lebih terjamin.

4. Strategi Pengendalian Inflasi pada Musim Puncak Permintaan

Strategi pengendalian inflasi di Kabupaten Bogor pada musim puncak permintaan, seperti menjelang Idul Fitri, melibatkan operasi pasar, penyediaan pangan murah, dan peningkatan pasokan pangan. Kebijakan ini efektif untuk menurunkan harga sementara, namun terkendala oleh persiapan stok yang kurang matang dan distribusi yang tidak merata, menyebabkan beberapa daerah tetap mengalami lonjakan harga. Untuk meningkatkan efektivitas, perlu ada persiapan stok yang lebih baik, koordinasi antara pemerintah dan distributor, serta penjadwalan operasi pasar secara lebih rutin dan merata. Pemanfaatan teknologi untuk memantau pasokan dan permintaan juga dapat membantu merespons lonjakan permintaan lebih cepat.

5. Kolaborasi dan Koordinasi Antar Instansi dan Daerah

Koordinasi dan kolaborasi antar instansi di Kabupaten Bogor dalam pengendalian inflasi masih menghadapi tantangan seperti kurangnya integrasi data dan komunikasi yang kurang efektif antar sektor, yang mengurangi efektivitas kebijakan. Kerja sama dengan pihak swasta dan petani juga terhambat oleh keterbatasan dukungan teknis dan akses pasar. Selain itu, koordinasi antar daerah dalam distribusi barang kebutuhan pokok belum optimal, menyebabkan disparitas harga antar wilayah. Untuk memperbaiki hal ini, diperlukan sistem informasi terpadu antar instansi, peningkatan keterlibatan pihak swasta dan masyarakat, serta koordinasi lebih baik antar daerah untuk memastikan pasokan merata dan pengendalian inflasi yang lebih efektif.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Peningkatan Koordinasi Antar Instansi

Koordinasi antar instansi terkait, seperti Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, dan TPID, perlu

diperkuat dengan membangun sistem informasi terpadu yang memungkinkan pemantauan stok dan harga barang kebutuhan pokok secara real-time. Hal ini akan memastikan kebijakan pengendalian inflasi yang diambil lebih akurat dan tepat waktu, serta berbasis data yang akurat. Selain itu, komunikasi yang lebih intensif dan koordinasi rutin antar instansi sangat penting untuk mendiskusikan langkah-langkah yang perlu diambil guna menghadapi tantangan inflasi, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih holistik dan sinergis.

2. Penguatan Kolaborasi dengan Pihak Swasta dan Masyarakat

Pengendalian inflasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif pihak swasta dan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kolaborasi dengan sektor swasta, terutama dalam hal distribusi barang dan pasokan pangan. Memberikan insentif kepada distributor dan pedagang yang berperan dalam menjaga kestabilan harga akan mendorong mereka untuk lebih responsif terhadap fluktuasi harga. Di sisi lain, dukungan bagi petani juga sangat diperlukan, seperti memberikan akses pasar yang lebih luas, pelatihan teknis, dan subsidi untuk sarana produksi. Hal ini akan memastikan produksi pangan lokal yang lebih stabil, sehingga pasokan pangan yang cukup dapat terjamin.

3. Optimalisasi Cadangan Pangan Daerah

Untuk mengatasi fluktuasi harga yang sering terjadi, terutama selama musim puncak permintaan, penting bagi Kabupaten Bogor untuk membangun dan mengelola cadangan pangan daerah yang cukup. Cadangan ini dapat digunakan untuk mengatasi kekurangan pasokan yang mungkin terjadi, sehingga stabilitas harga pangan dapat terjaga. Selain itu, perlu adanya peningkatan fasilitas penyimpanan pangan yang dapat menampung hasil produksi berlebih selama musim panen. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada pasokan eksternal saat terjadi kelangkaan dan menjaga kestabilan harga pangan sepanjang tahun.

4. Perbaikan Distribusi Antar Daerah

Distribusi pangan yang tidak merata sering kali menjadi penyebab disparitas harga di berbagai wilayah Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, koordinasi antar daerah perlu diperbaiki untuk memastikan bahwa pasokan pangan dapat merata dan tidak terhambat oleh masalah distribusi logistik. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pasokan barang kebutuhan pokok tersedia di setiap wilayah, terutama di daerah-daerah yang rawan mengalami lonjakan harga. Peran TPID juga harus dioptimalkan dalam merencanakan dan mengawasi distribusi pangan secara efektif, dengan memperhatikan kebutuhan spesifik di setiap kecamatan atau wilayah.

5. Pendidikan dan Sosialisasi kepada Masyarakat

Sosialisasi mengenai kebijakan pengendalian inflasi harus diperluas kepada masyarakat agar mereka lebih paham mengenai dampak inflasi dan cara menghadapinya. Salah satu langkah penting adalah dengan mengedukasi masyarakat tentang cara mengelola konsumsi barang

kebutuhan pokok yang rentan terhadap inflasi, seperti cabai, bawang, dan daging. Pendidikan ini dapat membantu masyarakat mengurangi konsumsi berlebihan, yang pada gilirannya dapat menstabilkan harga pasar. Selain itu, diversifikasi konsumsi pangan yang lebih beragam juga perlu diperkenalkan agar masyarakat tidak terlalu bergantung pada komoditas tertentu yang sering mengalami lonjakan harga.